WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN
SASARAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pejabat Administrator
3. Para Pejabat Pengawas
4. Para Pejabat Fungsional
5. Para Pejabat Pelaksana

di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Melakukan penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021 dengan berpedoman pada :
1. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
2. Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021.

KEDUA : Para Asisten Sekretaris Kota, para Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian, dalam pelaksanaan penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021 menggunakan indikator kinerja Perjanjian Kinerja, indikator rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah dan indikator kinerja lainnya sebagai turunan (*cascading*) dari target kinerja atasan langsung, sebagai berikut:
a. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terdapat pada lampiran I;

b. Para Kepala Bagian menggunakan Cascading Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021 sebagaimana terdapat pada lampiran II;
c. Para Kepala Sub Bagian menggunakan Cascading Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021 sebagaimana terdapat pada lampiran III.

KETIGA : Pejabat Penilai Sasaran Kinerja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 907 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1529 Tahun 2017 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja.

KEEMPAT : Para Kepala Bagian mengoordinasikan penyusunan, penandatanganan dan penginputan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing.

KELIMA : Para Kepala Bagian memastikan terlaksananya proses unggah/*upload* dokumen Perjanjian Kinerja oleh seluruh pejabat struktural di lingkungan kerjanya masing-masing pada Sistem Informasi e-SAKIP melalui laman https://sakip.jakarta.go.id.

KEENAM : Para Kepala Bagian mengoordinasikan penyampaian dokumen Format Rencana Kinerja Tahunan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja, dari seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2021

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Uus Kuswanto, S. Sos., M.A.P.
NIP 197301211993031004

Tembusan :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran I : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor 10 Tahun 2021
Tanggal 12 Maret 2021

CASCADING INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PARA ASISTEN SEKRETARIS KOTA

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan	Asisten			Catatan
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-Kinerja	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB.	N/A	N/A	N/A	85	85	Indeks	✓			Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM	N/A	N/A	N/A	86	86	Nilai	✓ (Ketertiban Umum)	✓ (PPSU)	✓ (Posyandu, PKK, Jumantik, RPTRA)	indikator Kinerja Perjanjian Kinerja diinput melalui Sistem Informasi e-SAKIP
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	e-Kinerja	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Serapan Anggaran ≥80% dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <80% dan ouput <100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran ≥80%, namun output <100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen			✓	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase		✓		Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi/ Monev KSD

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan	Asisten			Catatan
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra	
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase		✓	✓	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi/ Monev KSD
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	✓		✓	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi/ Monev KSD
6	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase		✓		Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi/ Monev KSD
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan omor 61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase	✓	✓	✓	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi/ Monev KSD
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor 63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase	✓			Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi/ Monev KSD
8	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor 66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	✓	✓		Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi/ Monev KSD
9	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor 73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	100%	N/A	100%	Persentase		✓		Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi/ Monev KSD
10	Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase			✓	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP			✓	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi. c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang. Perhitungan : a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan. c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan. d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase			✓	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/Predikat minimal A diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai:81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	Predikat			✓	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan	Asisten			Catatan
						I	II	III	IV			Pem	Ekbang	Kesra	
14	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	✓			Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	e-Kinerja	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	85	87	90	93	93	Nilai	✓			Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100%	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase			✓	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Uus Kuswanto, S. Sos., M.A.P.
NIP 197301211993031004

Lampiran II : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor Tahun 2021
Tanggal Maret 2021

CASCADING INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PARA KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KOTA

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan	Kepala Bagian								Catatan
						I	II	III	IV			Pem	Hukum	KKPP	Ekonomi	PLH	Umum	Keu	Kesra	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-Kinerja	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB.	N/A	N/A	N/A	85	85	Indeks			✓						Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM	N/A	N/A	N/A	86	86	Nilai	Diturunkan menjadi Indikator Kinerja Program Sesuai Perjanjian Kinerja dalam eSAKIP								indikator Kinerja Perjanjian Kinerja diinput melalui Sistem Informasi e-SAKIP
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	e-Kinerja	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah diletapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Serapan Anggaran ≥80% dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <80% dan ouput <100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran ≥80%, namun output <100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen							✓		Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase				✓					Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					✓		✓		Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase			✓				✓		Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
6	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase					✓				Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Satuan	Kepala Bagian								Catatan
						I	II	III	IV			Pem	Hukum	KKPP	Ekonomi	PLH	Umum	Keu	Kesra	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor 61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase			✓		✓		✓		Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor 63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase	✓								Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
8	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor 66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	✓			✓	✓				Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
9	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor 73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	100%	N/A	100%	Persentase					✓				Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
10	Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase							✓		Indikator Kinerja Lainnya dinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP							✓		Indikator Kinerja Lainnya dinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi. c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang. Perhitungan : a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan. c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan. d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						✓			Indikator Kinerja Lainnya dinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/Predikat minimal A diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai:81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	Predikat							✓		Indikator Kinerja Lainnya dinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
14	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase			✓						Indikator Kinerja Lainnya dinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	e-Kinerja	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	85	87	90	93	93	Nilai	✓								Indikator Kinerja Lainnya dinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100%	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase							✓		Indikator Kinerja Lainnya dinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Uus Kuswanto, S. Sos., M.A.P.
NIP 197301211993031004

Lampiran III : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor 10 Tahun 2021
Tanggal 12 Maret 2021

CASCADING INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PARA KEPALA SUBBAGIAN SEKRETARIAT KOTA

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Eselon 4 Penanggung Jawab	Catatan
						I	II	III	IV				
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-Kinerja	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB.	N/A	N/A	N/A	85	85	Indeks	Tatalaksana	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM	N/A	N/A	N/A	86	86	Nilai	Diturunkan menjadi Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan / Setara Eselon 4	indikator Kinerja Perjanjian Kinerja diinput melalui Sistem Informasi e-SAKIP
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	e-Kinerja	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Serapan Anggaran ≥80% dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <80% dan ouput <100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran ≥80%, namun output <100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen	Program dan Anggaran	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Eselon 4 Penanggung Jawab	Catatan
						I	II	III	IV				
4	Sosialisasi pendaftaran secara online di kelurahan	1	Pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran di Kelurahan	e-Monev KSD	TA21-B03: 1. Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT minimal sekali 2. Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT 3. Fasilitasi pendaftaran PKT secara online di kelurahan untuk kelompok masyarakat miskin dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT TA21-B06: 1. Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT minimal sekali 2. Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT 3. Fasilitasi pendaftaran PKT secara online di kelurahan untuk kelompok masyarakat miskin dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT TA21-B09: 1. Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT minimal sekali 2. Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT 3. Fasilitasi pendaftaran PKT secara online di kelurahan untuk kelompok masyarakat miskin dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT TA21-B12: 1. Dilaksanakannya sosialisasi pendaftaran dan branding PKT di tiap kelurahan dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT minimal sekali 2. Inventarisasi data calon peserta PKT sesuai peminatan PKT dengan didampingi oleh pendamping SKPD PKT	100	100	100	100	100	Persentase	Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
5	1. Penyusunan Pergub tentang kemitraan 2. Penyusunan Pergub tentang penataan PKL 3. Penyusunan Pergub tentang pengembangan kawasan UMKM 4. Penyusunan Pergub tentang e-order 5. Beroperasinya kios di sisi jalan utama 6. Penataan UMKM di 4 Stasiun (Tebet, Gondangdia,Palmerah,Manggarai)7. Tersedianya ruang usaha bagi UMKM di pusat perbelanjaan 8. Beroperasinya tentang Kawasan UKM dan sentra ekspor UMKM di kawasan Kota Tua 9. Beroperasinya Jakarta Creative Hub sebagai sentra ekraf/UKM dan pariwisata	1	Penyediaan Ruang Usaha	e-Monev KSD	TARGET B.06 Penetapan lokasi kios (Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Adm Jakarta Selatan, Kota Adm Jakarta Barat)	N/A	100	N/A	N/A	100	Persentase	Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
6	Penyampaian Dokumen BAST Fasos Fasum ke BPAD	1	Penyerahan Dokumen BAST Fasos Fasum ke BPAD selaku PPAD	e-Monev KSD	TA21-B03: 100% Dokumen BAST tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke BPAD TA21-B06: 100% Dokumen BAST tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke BPAD TA21-B09: 100% Dokumen BAST tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke BPAD TA21-B12: 100% Dokumen BAST tahun 2021 beserta dokumen teknis atau lampirannya disampaikan ke BPAD	100	100	100	100	100	Persentase	- Penataan Ruang, Pertanakan dan Perumahan - Tata Usaha Keuangan	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
7	Tersusunnya dokumen kinerja tepat waktu (Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai/SKP)	1	Meningkatnya nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B03: B03Ditetapkannya Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021Data Dukung:Laporan Rekapitulasi Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021 Menunggu Verifikasi TA21-B09: B09Disusunnya Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022 Data Dukung:Soft Copy Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022	100	N/A	100	N/A	100	Persentase	Talaksana	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
8	Tersusunnya laporan kinerja Pemerintah Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	1	Meningkatnya nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B03: B031. Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020Data Dukung: Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 20202. Terinputnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 pada aplikasi esr.menpan.go.id (akhir Januari 2021)Data Dukung : Screenshot LKIP telah terupload	100	N/A	N/A	N/A	100	Persentase	Talaksana	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Eselon 4 Penanggung Jawab	Catatan
						I	II	III	IV				
9	Tersusunnya hasil evaluasi kinerja tepat waktu	1	Meningkatnya nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP pada Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B03: B031. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2020 (selesai di akhir Januari 2021)Data Dukung :Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 20202. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW IV Tahun 2020 (selesai di akhir Januari 2021)Data Dukung :Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3,4 dan Fungsional TW IV Tahun 2020 TA21-B06: B061. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2021 (selesai di April 2021)Data Dukung :Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2021 2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW I Tahun 2021 (selesai di akhir April 2021)Data Dukung :Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2,3,4 dan Fungsional TW I Tahun 2021 TA21-B09: B091. Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022Data Dukung :Dokumen hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah 2017-20222. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2021 (selesai di Juli 2021)Data Dukung :Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2021 3. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW II Tahun 2021 (selesai di akhir Juli 2021)Data Dukung :Dokumen evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3,4 dan Fungsional TW II Tahun 2021 TA21-B12: B121. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2021 (selesai di Oktober 2021)Data Dukung :Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2021 2. Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW III Tahun	100	100	100	100	100	Persentase	- Talaksana - Program dan Anggaran	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
10	Terselesaikannya verifikasi calon penghuni Rumah Susun Kampung Kunir	1	Penghunian Rumah Susun Kampung Kunir	e-Monev KSD	TA21-B12: Verifikasi calon penghuni hunian permanen rumah susun Kampung Kunir (KK dan anggota keluarga) oleh Walikota Jakarta Selatan (Desember 2021)Penetapan SK Gubernur penghuni Rumah Susun Kampung Kunir (Desember 2021)Penghunian Rumah Susun Kampung Kunir (September 2022)	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase	Pekerjaan Umum	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
11	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawassan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d 2021	1	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada Kota Administrasi Jakarta Barat atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021	e-Monev KSD	TA21-B06: TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021. Target Capaian : 80%Catatan:Untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%Data Dukung :Berita acara hasil verifikasi Inspektorat. TA21-B12: TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021. Target Capaian : 85%Catatan:Untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi Hasil Pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%Data Dukung :Berita acara hasil verifikasi Inspektorat	N/A	100	N/A	100	100	Persentase	- Kepegawaian - Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan - Tata Usaha Keuangan	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
12	Terlaksananya pengumpulan data isian form asesmen transformasi digital dan data pengelolaan SPBE Perangkat Daerah	1	Asesmen Transformasi Digital dan Evaluasi SPBE pada Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B03: B03Tersampaikannya data hasil isian form asesmen transformasi digital Perangkat Daerah sesuai format pada Instruksi Sekda No 122 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan asesmen transformasi digital TA21-B09: B09Tersampaikannya data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB dan DKI Jakarta	100	N/A	100	N/A	100	Persentase	Tata Praja	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
13	Tersusunnya Berita Acara Hasil Verifikasi Lokasi Penataan Kawasan	1	Persetujuan Lokasi Penataan Kawasan TA 2021 di Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B03: Tersusunnya Berita Acara Hasil Verifikasi Lokasi Penataan Kawasan (minimal ditandatangani oleh Walikota/Bupati, Kepala Bappeda/Subanppeko/kab, dan Kepala Dinas/Sudin CKTRP)	100	N/A	N/A	N/A	100	Persentase	Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
14	Terselesaikannya penyusunan muatan rencana penataan kawasan di wilayah Kota Adm. Jakarta Barat yang dilakukan oleh Sudin CKTRP dan Subanpeko sesuai dengan Rapergub Penguatan Peran Walikota/Bupati untuk Penataan Kawasan di Wilayah Kota/Kab. Adm.	1	Koordinasi dan pemantauan penyelesaian penyusunan rencana penataan kawasan TA 2021 di Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B06: Tersusunnya muatan rencana penataan kawasan di wilayah Kota Adm. Jakarta Barat	N/A	100	N/A	N/A	100	Persentase	Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
15	Tersusunnya Berita Acara Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan	1	Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan Tahun 2021 oleh PD/UKPD terkait di Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B09: Tersusunnya Berita Acara Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan (dengan lampiran dokumen Rancangan Rencana Penataan Kawasan wilayah Kota Adm. Jakarta Barat yang telah disepakati)	N/A	N/A	100	N/A	100	Persentase	Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
16	Terlaksananya simulasi penataan kawasan Kota Adm. Jakarta Barat pada progres pekerjaan 90%;Tersusunnya nota dinas Walikota kepada Sekda untuk permohonan persetujuan	1	Koordinasi permohonan persetujuan Sekda terkait Rancangan Rencana Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B12: Terlaksananya simulasi penataan kawasan untuk rancangan rencana penataan kawasan di Kota Adm. Jakarta Barat; Tersedianya nota dinas permohonan persetujuan rencana penataan kawasan di wilayah Kota Adm. Jakarta Barat	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase	Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
17	Tersusunnya Berita Acara Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan Mangga Besar	1	Tindak Lanjut Simulasi Penataan Kawasan Tahun 2020 (Kawasan Mangga Besar)	e-Monev KSD	TA21-B03: Tersusunnya Berita Acara Persetujuan Rancangan Rencana Penataan Kawasan Mangga Besar	100	N/A	N/A	N/A	100	Persentase	Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Eselon 4 Penanggung Jawab	Catatan
						I	II	III	IV				
18	Tersusunnya kalender pelaksanaan kegiatan penataan kawasan TA 2021 sesuai dengan DPA UKPD atau PD yang terkait (Kawasan Sentra Primer Barat dan Kawasan Mangga Besar)	1	Kalender pelaksanaan penataan kawasan TA 2021 di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kawasan Sentra Primer Barat dan Kawasan Mangga Besar)	e-Monev KSD	TA21-B06: Tersusunnya Kalender pelaksanaan kegiatan penataan kawasan TA 2021 di Kota Adm. Jakarta Pusat antara Walkota dengan PD dan UKPD yang terkait (Kawasan Sentra Primer Barat dan Kawasan Mangga Besar)	N/A	100	N/A	N/A	100	Persentase	Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
19	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan UKPD terkait Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat untuk TA 2021 dan TA 2022	1	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan UKPD terkait Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat untuk TA 2021 dan TA 2022	e-Monev KSD	TA21-B12: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan UKPD terkait Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk TA 2021 dan TA 2022 (Kawasan Sentra Primer Barat dan Kawasan Mangga Besar)	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase	Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
20	Tertanggulanginya RWRW rawan banjir yang bersifat lokal	1	Penanggulangan RW-RW rawan banjir yang bersifat lokal di Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B03: Tersusunnya daftar RW-RW rawan banjir bersifat lokal di wilayah dan daftar rencana tindakan penanggulangan oleh masing-masing Walikota yang disetujui oleh Asisten Pemerintahan TA21-B06: Tereksekusinya tindakan penanggulangan banjir yang bersifat lokal sebanyak 30 TA21-B09: Tereksekusinya tindakan penanggulangan banjir yang bersifat lokal sebanyak 60 TA21-B12: Tereksekusinya tindakan penanggulangan banjir yang bersifat lokal sebanyak 100	100	100	100	100	100	Persentase	Pekerjaan Umum	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
21	Peningkatan kualitas proses partisipatif dengan adanya pedampingan masyarakat dan SKPD terkait oleh aparat wilayah dalam Community Action Plan, dimana aparat wilayah berperan sebagai jembatan penghubung kedua belah pihak	1	Pendampingan aparat wilayah dalam proses partisipasi masyarkat pada program penataan kampung Community Action Plan di Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B12: Tersusunnya laporan pendampingan aparat wilayah dalam Community Action Plan	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase	Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
22	Terselesaikannya pegecetan mural di Seluruh Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	1	Pengecatan Mural Lokasi +Jakarta di Seluruh Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B03: Terselesaikannya pengecetan mural lokasi +Jakarta di Seluruh Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	100	N/A	N/A	N/A	100	Persentase	PPKP	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
23	Terbangunnya instalasi +Jakarta di setiap Kota/Kabupaten Administratif	1	Pembangunan Instalasi +Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B03: Terselesaikannya Perencanaan Instalasi TA21-B06: Instalasi sudah terbangun dengan target masingmasing kota 1	100	100	N/A	N/A	100	Persentase	Tatapraja	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
24	Terdampinginya aktivasi wisata religi di Masjid Al-Mansur oleh Walikota	1	Pendampingan Walikota dalam penataan Wisata Religi: Masjid Al-Mansur	e-Monev KSD	TA21-B12: Tersusunnya laporan pendampingan Walikota dalam penataan destinasi wisata religi Masjid Al Mansur	N/A	N/A	N/A	100	100	Persentase	Pekerjaan Umum	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
25	Terdatanya dan ditetapkannya lokasi sementara PKL di Kawasan Kota Tua dan terdampinginya proses penataan Kota Tua oleh Walikota	1	Pendampingan Walikota dan Penataan PKL di Kawasan Kota Tua	e-Monev KSD	TA21-B03: Terbitnya penetapan Lokasi Sementara PKL di Kawasan Kota Tua TA21-B12: Tersusunnya laporan pendampingan Walikota dalam penataan Kota Tua	100	N/A	N/A	100	100	Persentase	Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
26	Terlaksananya dan terjaganya pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan terjadwal sampah di RW yang telah ditetapkan (mengacu pada KSD 26)	1	Pendampingan pengurangan sampah dari sumber pada tingkat RW di Kota Administrasi Jakarta Barat	e-Monev KSD	TA21-B03: Pendampingan pembentukan bidang pengelolaan sampah di seluruh RW di JakartaPendampingan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan sampah di seluruh RW di Jakarta (30%) TA21-B06: Pendampingan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan sampah di seluruh RW di Jakarta (100%) TA21-B12: Pendampingan pengawasan dan maintain pelaksanaan pemilahan dan pengangkutan terjadwal di RW yang telah ditetapkan (mengacu pada KSD 26)	100	100	N/A	100	100	Persentase	Lingkungan Hidup clan Ruang Terbuka Hijau	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD
27	Terlaksananya serah terima lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT	1	Penagihan SIPPT/IPPR yang memilki kewajiban fasos fasum	e-Monev KSD	TA21-B03: 5% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah diserahterimakan TA21-B06: 10% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah diserahterimakan (April 2021)25% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah diserahterimakan (Mei 2021)50% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah diserahterimakan (Juni 2021) TA21-B09: 100% lahan dan/atau konstruksi yang merupakan kewajiban dari SIPPT telah diserahterimakan (Jul 2021)	100	100	100	N/A	100	Persentase	Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	Indikator Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Sistem Informasi / Monev KSD

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	Eselon 4 Penanggung Jawab	Catatan
						I	II	III	IV				
28	Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	Program dan Anggaran	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
29	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP	Tata Usaha Keuangan	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
30	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi. c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang. Perhitungan : a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan. c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan. d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	Tata Usaha	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
31	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/Predikat minimal A diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai:81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	Predikat	Program dan Anggaran	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
32	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	Pelayanan Publik	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
33	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	e-Kinerja	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	85	87	90	93	93	Nilai	Bina Pemerintahan	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
34	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100%	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase	Tata Usaha Keuangan	Indikator Kinerja Lainnya diinput melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Uus Kuswanto, S. Sos., M.A.P.
NIP 197301211993031004